

KONSTRUKSI RUU PKS DALAM FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

Zakiya Fatihatur Rohma
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: zakiyafat07@gmail.com

Abstract: *The draft law of P-KS that has entered the hearing stage still raises polemic in the community. Basically, every new law will cause pros and cons. However, due to the pros and cons of the RUU P-KS in the community, there is a central role of the mass media. Through framing (news frame) media has the power to influence the perceptions of audiences. Therefore, this study aims to determine the construction of the RUU P-KS in framing online media coverage. The framing analysis used was the analysis of William A. Gamson and Modigliani's Framing. The online media analyzed are Voa-islam.com and Nu.or.id. The results showed that there were three images constructed by Voa-islam.com on the RUU P-KS, namely a good image of the PKS and Gerindra parties, a good image of the Islamic system and images of phrases of sexual violence. Whereas Nu.or.id also built three images on the framing of the RUU P-KS, namely the image of the importance of the RUU P-KS to be ratified, the image of both the DPR and the government and the image of the RUU P-KS is not a law that is pro-zina or LGBT*

Keywords: *Construction, RUU P-KS, Framing, Islamic Online media.*

Pendahuluan

RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) telah diajukan sejak awal tahun 2017 dan saat ini telah memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RUU P-KS ditargetkan akan dibahas setelah pemilu 2019.¹ Meskipun demikian, RUU PKS kembali menjadi perbincangan dan perdebatan di masyarakat terutama menjelang pilpres (pilihan presiden). Bahkan, isu RUU PKS dianggap berhubungan dengan isu politik. Pihak yang setuju dengan RUU PKS dianggap memilih paslon No. 01 sedangkan yang menolak RUU PKS dianggap mendukung paslon No. 02. Hal ini berkaitan dengan sikap partai yang berkoalisi dengan masing-masing paslon terhadap RUU PKS.

Selain itu, forum-forum diskusi yang membahas tentang RUU PKS mulai diadakan di beberapa instansi, utamanya di Yogyakarta. Adanya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswa UGM dianggap sebagai bukti pentingnya RUU PKS segera disahkan. Kasus kekerasan seksual lainnya yang menjadi pertimbangan pengesahan RUU PKS adalah kasus ibu Baiq Nuril dan siswi SMP

¹Anonim, RUU PKS Dibahas Usai Pemilu 2019, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19203>, Diakses tanggal 20 Maret 2019.

berusia 14 tahun yang diperkosa 14 pemuda. RUU PKS sendiri dianggap sebagai Undang Undang yang akan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Meskipun terdapat pula pihak yang menganggap bahwa RUU PKS merupakan undang undang yang akan melegalkan seks bebas.

Sehubungan dengan adanya Pro-Kontra RUU PKS di masyarakat, terdapat peran sentral media massa. Dalam pandangan William A. Gamson, media mempunyai kekuatan untuk menggerakkan massa melakukan gerakan sosial atau aksi tertentu melalui framing berita. Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui cara pandang wartawan dalam menulis berita.² Cara pandang itu lah yang menentukan arah berita dan bagaimana berita tersebut didefinisikan. Masyarakat kemudian akan memahami suatu isu dari apa yang didefinisikan oleh media (si wartawan) atau dari apa yang dicitrakan oleh media.³ Karena nya, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana konstruksi RUU PKS yang dilakukan media online melalui framing pemberitaan Voa-islam.com dan Nu.or.id? Kedua media tersebut adalah media online islam yang mempunyai pandangan berseberangan terhadap RUU PKS. Sehingga, perbedaan tersebut akan memberikan pandangan bagaimana framing suatu berita berhubungan dengan tujuan politik tertentu.

Landasan Teori

Dalam paradigma kritis, berita dianggap sebagai sesuatu yang tidak netral dan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pandangan mereka. Karena itu, kaum kritis menganggap bahwa berita adalah hasil dari pertarungan wacana antar berbagai kekuatan di masyarakat yang selalu melibatkan pandangan dan ideologi wartawan atau media. Pertarungan yang terjadi pada umumnya dimenangkan oleh kelompok atau kekuatan dominan yang ada di masyarakat.⁴

Dengan demikian ideologi wartawan atau media mempunyai pengaruh terhadap bagaimana suatu realitas ditampilkan dalam berita. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann realitas merupakan hasil konstruksi dan bukan sesuatu yang alami. Setiap orang melakukan konstruksi atas realitas berdasarkan pengalaman, tingkat pendidikan, lingkungan sosial serta orientasi atau pandangan politik masing-masing.⁵

Termasuk dalam hal ini realitas atas RUU PKS. Antara Nu.or.id dan Voa-islam.com mempunyai ideologi dan kepentingan tertentu dalam melakukan pemberitaan RUU PKS. Hal yang paling mendasar untuk melihat perbedaan tersebut adalah dari perbedaan dasar pemikiran atau paham keagamaan antar keduanya. Meskipun keduanya merupakan media islam namun mempunyai perbedaan ideologi.

Media massa islam sendiri merupakan media yang difungsikan sebagai media dakwah islam. Islam yang didakwahkan juga menjadi beragam sesuai dengan ideologi golongan-golongan islam tertentu. Media massa islam juga difungsikan sebagai alat edukasi dan penyadaran masyarakat tentang nilai dan ajaran agama islam.⁶ Dalam sejarahnya, terdapat banyak media massa islam yang pernah dan masih terbit sampai sekarang mulai dari media cetak dan media online. Misalnya Al-imam, Al-Munir, Suara

² Eriyanto, "Analisis Framing", Yogyakarta: Lkis, 2009. Hlm. 220

³ Syarifudin, dkk., "Representasi Ideologi Media Dibalik Wacana Calon Gubernur", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 20, No. 01, (2016). Hlm 4-5.

⁴ Sumarjo, "Pertarungan Wacana Media", Jurnal Inovasi Vol. 7 No. 2 (2010): 34-35.

⁵ Nanang Mizwar Hasyim, "Konstruksi Citra Maskulin Calon Presiden", UIN Sunan Kalijaga, Vol. 10 No. 01 (2016). Hlm. 3-4.

⁶ Roni Tabroni, Media Massa Islam. Yogyakarta: Calpulis, 2017. Hlm. 33.

Muhammadiyah, Risalah dan majalah Bangkit. Sedangkan contoh dari media online islam adalah republika.com, suara-islam.com, Voa-islam.com, Nu.orid dan suaramuhammadiyah.or.id.

Metode Penelitian

Voa-islam dan Nu.or.id merupakan media islam yang mempunyai paham keagamaan atau dasar pemikiran yang berbeda. Dasar pemikiran Voa-islam.com hanya dari Al-Quran, yakni berdasarkan surat An-Nahl ayat 25, Al-Hujurat ayat 6 dan Ash-Shaff ayat 10-12.⁷ Sedangkan dasar pemikiran Nu.or.id tidak hanya Al-Quran dan sunnah, namun juga kemampuan akal dan realitas empirik.⁸

Perbedaan cara pandang keagamaan, ideologi dan orientasi politik mempengaruhi cara pemberitaan. Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang tersebut sebagai kemasan (*package*). Kemasan (*package*) adalah struktur pemahaman yang digunakan individu atau kelompok dalam mengkonstruksi dan menafsirkan makna suatu pesan.⁹

Package tersebut akan membantu komunikator untuk menyampaikan muatan-muatan di balik suatu isu atau peristiwa.

Perangkat framing yang digunakan oleh William A. gamson dan Modigliani tergambar sebagai berikut:

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methapors Perumpamaan atau pengandaian	Roots Analisis kausal atau sebab akibat.
Catchphrases Frasa yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	Appeals to principle Premis dasar, klaim-klaim moral.
Exemplaar Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.	Consequences Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.
Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. <i>Depiction</i> ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.	
Visual images Gambar, grafis, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto,	

⁷ <https://www.voa-islam.com/>, diakses Minggu 31 Maret 2019.

⁸ <http://www.nu.or.id/>, diakses Minggu 31 Maret 2019.

⁹ Ibid. Eriyanto Hlm. 224.

kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.

Hasil Penelitian

1. Voa-islam.com ; Voice of the truth

Voa-islam resmi beroperasi sejak Juni 2009 dan didirikan di Bekasi Jawa Barat. Voa-islam mempunyai jargon “*Voice of the truth*”. Jargon tersebut sesuai dengan landasan pemikiran Voa-islam dari surat An-Nahl ayat 25 dan Al-hujurat ayat 6. Kedua ayat tersebut berisi himbauan untuk menyampaikan informasi dengan benar dan meneliti informasi yang diterima (tabayyun). Voa-islam fokus pada isu-isu islam di Asia-tenggara dengan tujuan untuk menyuarakan kepentingan umat islam.

Meskipun demikian, isu RUU PKS juga menjadi sorotan dalam pemberitaan Voa-islam dengan diterbitkannya belasan berita dan video tentang RUU PKS. Adapun dari belasan berita tersebut peneliti hanya mengambil 4 berita. Yakni yang berjudul “PA 212 Dukung PKS tegas Tolak RUU PKS”,¹⁰ “Mahasiswi Hindu Pun Tolak RUU PKS”,¹¹ “Tolak RUU PKS, Korpus Korps PII Wati Datangi Fraksi Gerindra”,¹² “Waspada Bahaya RUU P-KS, Upaya Legalisasi Zina dan Penyimpangan Seksual”.¹³ Keempat berita tersebut akan dianalisis menggunakan analisis framing William A. Gamson.

a. PA 212 Dukung PKS tegas Tolak RUU PKS

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methapors Tidak Ada	Roots RUU PKS dipandang sebagai Undang-Undang yang tidak mencerminkan nilai pancasila dan agama. Karena itu lah PKS sebagai partai islam menolak RUU PKS. Penggunaan frasa kekerasan seksual juga dinilai kurang tepat dan harus diganti dengan istilah kejahatan seksual.
Catchphrases Partai islam mendukung Undang-Undang yang berlandaskan pancasila.	Appeals to principle PKS adalah partai islam yang hanya mendukung Undang

¹⁰<http://voa-islam.com/read/indonesiana/2019/02/10/62077/pa-212-dukung-pkstegas-tolak-ruu-pks/#sthash.W1PKvcLS.dpbs>, Diakses 20 maret 2019.

¹¹<http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2019/02/19/62192/mahasiswi-hindu-pun-tolak-ruu-pks/#sthash.bzdcMqwP.dpbs>, Diakses 20 maret 2019.

¹² <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2019/03/19/62657/tolak-ruu-pks-korpus-korps-pii-wati-datangi-fraksi-gerindra/#sthash.3VFfVlrP.dpbs>, Diakses 20 maret 2019.

¹³ Ernadaa Rasyidah, <http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2019/01/31/61949/waspada-bahaya-ruu-pks-upaya-legalisasi-zina-dan-penyimpangan-seksual/#sthash.rfEHUHR1.dpbs>, Diakses 20 maret 2019.

PKS meminta dukungan doa untuk kemenangan di parlemen.	Undang yang mencerminkan nilai pancasila dan agama. Sehingga PKS dianggap sebagai partai yang mampu membantu dan mengadvokasi kepentingan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai islam.
Exemplaar Lebih mendukung RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Karena frasa kejahatan dianggap lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga, isu lebih difokuskan pada pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual dan pelibatan anak dalam tindakan seksual dan inses.	Consequences PKS menolak draf RUU PKS karena tidak pancasialis dan tidak sesuai dengan norma agama atau ajaran islam.
Depiction RUU PKS adalah undang-undang yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama.	
Visual images Tidak ada	

b. Mahasiswi Hindu Pun Tolak RUU PKS

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methapors Tidak ada.	Roots RUU PKS dianggap berpotensi melegalkan zina, LGBT dan akan mengikis sifat religius masyarakat. Karena jika RUU ini memang diniatkan untuk melindungi perempuan, seharusnya menggunakan terminologi kejahatan seksual bukan kekerasan seksual yang menimbulkan multitafsir.
Catchphrases RUU PKS berpotensi melegalkan zina, prostitusi dan LGBT.	Appeals to principle RUU PKS tidak hanya ditolak oleh umat umat muslim tapi juga oleh penganut agama lain, yakni penganut agama Hindu.
Exemplaar Adanya mahasiswa beragama Hindu yang juga menolak RUU PKS dan	Consequences RUU PKS bertentangan dengan ajaran atau norma-norma agama

turut diundang dalam diskusi.	(tidak hanya agama islam) dan harus ditolak.
Depiction RUU PKS multitafsir karena menggunakan istilah kekerasan seksual bukan kejahatan seksual. RUU PKS dapat mengikis sifat religi masyarakat.	
Visual images Foto para perempuan peserta diskusi. Salah satu diantara mereka membawa kertas bertuliskan “RUU-PKS bukan solusi” dan “Tolak RUU-PKS”	

c. Tolak RUU PKS, Korpus Korps PII Wati Datangi Fraksi Gerindra

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methapors Tidak ada	Roots RUU PKS ketika disahkan akan menghancurkan masa depan bangsa dan moral pelajar karena menyebabkan sekulerisasi nilai-nilai agama. RUU PKS dianggap sebagai bentuk upaya melegalkan zina, LGBT dan kerusakan moral.
Catchphrases RUU PKS dapat menghancurkan masa depan bangsa dan moral pelajar.	Appeals to principle Partai Gerindra dianggap sebagai partai yang menutup ruang-ruang zina dan LGBT. Karena itu lah Korps PII Wati meminta dukungan dari partai Gerindra untuk menolak RUU PKS. Korps PII Wati juga menghimbau DPR untuk meninjau kembali RUU PKS dan menerima usulan pihak kontra.
Exempla Frasa yang tepat adalah kejahatan seksual bukan kekerasan seksual.	Consequences Seluruh eselon korps PII Wati harus menentukan sikap untuk menolak RUU PKS.
Depiction Frasa kekerasan seksual mengandung multitafsir dan dapat berbenturan dengan subjektivitas pelaku korban.	
Visual images Adanya foto penyerahan surat sebagai bentuk pernyataan sikap dari korps PII	

Wati kepada fraksi partai Gerindra.

d. Waspada Bahaya RUU P-KS, Upaya Legalisasi Zina dan Penyimpangan Seksual

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methapors Racun berbalut madu, indah dari luar namun intinya mematikan, musibah besar dan mematikan api dengan menyiram bensin.	Roots RUU PKS memisahkan antara kekerasan seksual dengan penyimpangan seksual. Karena itu lah RUU ini dianggap sekuleris dan tidak sesuai dengan sistem islam. Padahal, antara kekerasan seksual dan penyimpangan seksual seharusnya berada di bawah payung hukum yang sama.
Catchphrases Adanya agenda tersembunyi dari Komnas Perempuan. RUU PKS memisahkan agama dengan keseharian masyarakat (sekulerisme)	Appeals to principle RUU PKS akan melegalkan zina, LGBT dan menghilangkan kewajiban menutup aurat. Karena yang disoroti dalam RUU ini hanya bentuk kekerasannya dan mengabaikan aktivitasnya. Misalnya pada kasus aborsi. Sistem islam dianggap berbeda dengan sistem demokrasi karena sistem islam menjamin perlindungan dan kemuliaan perempuan.
Exemplaar Pasal yang dianggap bermasalah adalah ketika soal kekerasan seksual dipisahkan dari penyimpangan seksual. Misalnya pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.	Consequences RUU PKS adalah produk sistem demokrasi, sekuleris dan bukan produk sistem islam. Sehingga RUU ini dianggap berbahaya dan harus ditolak.
Depiction RUU PKS didukung kaum feminis dan liberal. RUU PKS sebagai tol pelegalan zina dan LGBT karena tidak mengatur bentuk penyimpangan seksual dan hanya mengatur bentuk kekerasan seksualnya. Sistem demokrasi adalah lahan subur bagi tindakan kejahatan	
Visual images Tidak ada	

2. Nu.or.id ; Soeara Nahdlatol Ulama

Nu.or.id merupakan media informasi dan berita bagi masyarakat yang dikelola oleh ormas Nahdlatul Ulama. Jargon yang diangkat adalah Soeara Nahdlatol Ulama. Sehingga, berita yang dimuat dalam kanal media ini memang dominan berita tentang kegiatan-kegiatan ormas Nahdlatul Ulama.

Meskipun demikian, Nu.or.id juga memuat beberapa berita tentang RUU PKS. Karena isu kekerasan seksual juga menjadi sorotan NU yang dibahas pada Munas-Konbes NU 2019 (Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama). Namun, berita yang dimuat hanya berita yang pro terhadap RUU PKS saja. Dari belasan berita tersebut peneliti juga hanya mengambil 4 berita. Yakni yang berjudul “Tidak Benar UU P-KS Dukung Perilaku Seks Bebas”,¹⁴ “Perdebatan Para Kiai dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”,¹⁵ “KOPRI PB Dorong Disahkannya RUU PKS”,¹⁶ dan “Lakpesdam NU: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Segera Disahkan”.¹⁷

a. Tidak Benar UU P-KS Dukung Perilaku Seks Bebas

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methapors Tidak ada	Roots Hasil Munas-Konbes NU menyetujui disahkannya RUU PKS, bahkan mendesak untuk segera disahkan. Karena itu, masyarakat dihibau untuk tidak mudah mempercayai berita-berita miring tentang RUU PKS.
Catchphrases Munas Konbes NU merekomendasikan segera disahkannya RUU PKS. Pengesahan Undang-Undang adalah wewenang lembaga legislatif dan eksekutif.	Appeals to principle RUU PKS tidak melegalkan LGBT dan seks bebas. Begitu pun dengan pemerintah dan DPR. Justru adanya anggapan bahwa RUU PKS melegalkan LGBT dan seks bebas merupakan berita bohong yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan

¹⁴ Kendi Setiawan, <http://www.nu.or.id/post/read/103551/tidak-benar-uu-p-ks-dukung-perilaku-seks-bebas->, Diakses 20 maret 2019.

¹⁵ Ahmad Rozali, <http://www.nu.or.id/post/read/102487/perdebatan-para-kiai-dalam-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual->, Diakses 20 maret 2019.

¹⁶ Nurdiani Latifah, <http://www.nu.or.id/post/read/103389/kopri-pb-pmii-dorong-disahkannya-ruu-pks>, diakses 20 maret 2019.

¹⁷ Ahmad Rozali, <http://www.nu.or.id/post/read/102026/lakpesdam-nu-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-harus-segera-disahkan>, diakses 20 maret 2019.

	kepentingan golongan.
Exemplaar Tidak ada	Consequences RUU PKS segera disahkan karena RUU ini tidak melegalkan zina dan LGBT.
Depiction DPR dan pemerinta tidak mendukung LGBT dan seks bebas. Ada isu miring tentang RUU PKS yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab. Banyak korban kekerasan yang menunggu kejelasan hukum.	
Visual images Foto bertuliskan “Stop Kekerasan Seksual” sebagai bentuk visualisasi terhadap isi berita yang mendorong pengesahan RUU PKS.	

b. Perdebatan Para Kiai dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methaphors Serangan kabar palsu (hoaks), bola liar dan ruang ambigu.	Roots RUU PKS tidak melegalkan zina dan seks bebas. Karena RUU ini dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuan RUU PKS meliputi: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
Catchphrases RUU PKS sudah oke dan tidak melegalkan praktik zina. RUU PKS tidak membatalkan pasal perzinaan.	Appeals to principle Tujuan RUU PKS sangat mulia, yakni kemaslahatan umat. Justru yang membahayakan adalah adanya hoaks tentang RUU PKS. Misalnya berita bohong bahwa RUU PKS melegalkan zina dan seks bebas. Terutama ketika hoaks tersebut sudah menyebar di kalangan masyarakat,

	bahkan kalangan kiai NU.
Exemplaar Bab per bab harus dikritisi karena dapat menimbulkan benturan antara RUU dengan kaidah fikih. Misalnya sejauh apa ukuran pemaksaan yang diatur dalam RUU PKS.	Consequences RUU PKS tidak tidak melegalkan zina, namun untuk kemaslahatan umat. Perbedaan kiai NU atas RUU PKS hanya dalam hal furu'.
Depiction Sebagian besar orang setuju dengan RUU PKS. Tujuan RUU PKS mulia dan tidak bisa ditolak oleh siapapun.	
Visual images Foto seorang perempuan membawa kertas bertuliskan "Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" dan disebelahnya terdapat banner bertuliskan "Kami Butuh Rasa Aman Bukan Kecaman".	

c. KOPRI PB Dorong Disahkannya RUU PKS

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methapors Fenomena gunung es. Jalan terjal dan berliku.	Roots KOPRI PB PMII mendorong pemerintah mengesahkan RUU PKS karena banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dimana perempuan yang menjadi korban seringkali tdiak mendapat keadilan hukum. Misalnya pada kasus ibu Baiq Nuril.
Catchphrases Keluarga korban kekerasan seksual menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib. Isu kekerasan adalah isu bersama di berbagai negara.	Appeals to principle RUU PKS akan melindungi hak korban kekerasan seksual dan membantunya mendapatkan keadilan hukum.
Exemplaar Berdasarkan data PBB perempuan telah mengalami 35% kasus kekerasan seksual. Negara Tunisia, Yordania dan Lebanon melakukan revisi UU yang diskriminatif terhadap korban. Sementara di Swedia memberlakukan Undang-Undang bahwa seks tanpa persetujuan adalah	Consequences Segera sahkan RUU PKS untuk kepastian hukum bagi perlindungan perempuan.

pemeriksaan.	
Depiction Tingginya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat.	
Visual images Adanya foto yang memuat aksi Kopri PB PMII dalam peringatan Hari Perempuan Internasional. Dalam foto tersebut terlihat beberapa perempuan membawa spanduk dan bendera PMII serta seorang perempuan membawa alat pengeras suara.	

d. Lakpesdam NU: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Segera Disahkan

Framing device (perangkat framing)	Reasoning Device (perangkat penalaran)
Methaphors Tidak ada	Roots Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dan perlindungan terhadap korban kekerasan masih jarang dilakukan. Untuk itu, RUU PKS berupaya melindungi korban kekerasan, memberinya kompensasi dan menghukum pelaku kekerasan dengan sanksi yang berat.
Catchphrases RUU PKS mengupayakan sanksi bagi pelaku kekerasan dan memberi kompensasi bagi korban.	Appeals to principle RUU PKS memuat lima hal pertimbangan untuk segera disahkan. Lima hal tersebut meliputi darul mafasid, jalbul maslahih, nahyul munkar, hifdhul 'irdl dan hifdhun nasl. Kelima hal tersebut bertujuan untuk perlindungan dan pemuliaan perempuan.
Exemplaar Berdasarkan data tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2017 terdapat 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah privat atau personal.	Consequences Dukung DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS.
Depiction RUU PKS disusun oleh orang-orang beragama islam dan sumber penyusunan nya juga dari ajaran islam.	

Visual images

Terdapat sebuah foto yang berisi poster bertuliskan “Bersihkan Segala Bentuk Kekerasan Seksual di Kampus!”

Pembahasan

Setiap isu atau peristiwa yang sama dapat diartikan dengan berbeda dan menghasilkan pemberitaan yang berbeda pula. Peristiwanya sama, yakni Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan maknanya bagi pencegahan kekerasan seksual. Namun, peristiwa yang sama tersebut dikemas (*package*) secara berbeda oleh media. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat dari beberapa aspek.¹⁸ Aspek pemilihan kata, kalimat dan metafora yang digunakan. Atau aspek pemilihan narasumber berita yang menguatkan frame pemberitaan media nya.

Dalam pandangan Voa-islam.com RUU PKS merupakan undang-undang yang bertentangan dengan norma-norma agama. Tidak hanya bertentangan dengan norma agama islam, namun juga dengan norma agama lain seperti agama Hindu. Hal ini misalnya terlihat dari kutipan teks berikut:

“Setelah mendengar penjelasan ibu Nurul, saya semakin yakin untuk menolak RUU ini. Karena RUU P-KS berpotensi melegalkan zina, prostitusi serta LGBT. Dalam agama Hindu ketiga hal tersebut dilarang”

Kutipan pernyataan salah seorang mahasiswa Hindu yang menolak RUU PKS dijadikan label bahwa RUU ini tidak sesuai dengan norma ajaran Hindu. Selain itu, RUU PKS juga dinilai berpotensi melegalkan Zina, LGBT dan seks bebas. Karena RUU ini memisahkan pembahasan kekerasan seksual dengan penyimpangan seksual. Padahal, penyimpangan seksual seharusnya menjadi inti atau ruh dalam RUU PKS. Hal ini seperti kutipan teks berikut:

“Pasal-pasal nya tidak terlalu bermasalah, hanya ada beberapa yang bermasalah yang paling inti. Nama RUU ini kan bagus, Penghapusan Kekerasan Seksual, siapa yang nggak setuju, semua harus setuju. Masalahnya, RUU ini tidak memenuhi harapan dari masyarakat kebanyakan di Indonesia, yaitu soal kekerasan seksual itu tidak dipisahkan dari penyimpangan seksual”

Dalam pandangan Euis Sunarti, ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (Giga) Indonesia, dengan memisahkan isu kekerasan seksual dan penyimpangan seksual merupakan bentuk dari sekularisme. Karena tidak seharusnya isu kekerasan dipisahkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Isu LGBT yang seharusnya diatur dalam RUU PKS justru tidak disinggung sedikit pun. Bahkan, fokus RUU ini hanya pada masalah bentuk kekerasan nya, tapi tidak fokus pada aktivitas nya.

Pemberitaan dalam media online Voa-islam.com juga menggambarkan beberapa citra tertentu. Pertama, citra yang baik terhadap partai PKS dan Gerindra yang merupakan partai penolak RUU P-KS. Hal ini misalnya terlihat pada kutipan teks berikut:

¹⁸ Sasyabella Febriani, “Konstruksi Media terhadap The Jakmania oleh Media Cetak Kompas selama Putaran I dan II Liga Super Indonesia 2009/2010”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 11 (2011) Hlm. 3-4.

“Kami partai islam yang akan selalu memperjuangkan dan mendukung undang-undang yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila dan sesuai norma-norma agama. Jadi kami tegaskan menolak RUU ini”

Dengan mengutip pernyataan Mardani Ali Sera, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS, PKS dicitrakan sebagai partai yang benar-benar menjunjung nilai-nilai ajaran islam dan mempunyai nasionalisme tinggi. Pelabelan sebagai partai islam menegaskan kesungguhan PKS untuk menolak Undang-undang yang bertentangan dengan nilai ajaran islam. Karena itu, PKS diharapkan dapat mengisi 12% kursi di parlemen. Partai lainnya yang dicitrakan pro-islam adalah Gerindra. Gerindra juga dicitrakan sebagai partai yang menutup pintu-pintu zina dan LGBT.

Kedua, Citra yang baik terhadap sistem islam. RUU PKS yang berpotensi melegalkan seks bebas dan LGBT dinilai bersumber dari adanya sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Sistem demokrasi disebut sebagai sistem yang membuka kejahatan dan kemaksiatan. Sistem demokrasi ini kemudian dibenturkan dengan sistem islam yang dinilai lebih baik. Karena dalam sistem islam, perempuan diberikan perlindungan dan kemuliaan sesuai dengan kedudukannya sebagai *wa rabbatul bayt*. Hal ini seperti kutipan teks berikut:

“Berbeda halnya dengan sistem demokrasi, sistem islam adalah jaminan perlindungan dan kemuliaan bagi manusia. Hal ini dapat terwujud dengan penerapan hukum-hukumnya secara kaffah. Islam memposisikan perempuan sesuai fitrahnya, bukan sebagai komoditas yang hanya bisa dinilai dari materi. Islam menempatkan posisi perempuan sebagai ummu wa robbatul bayt, ibu dan pengatur rumah tangganya”

Ketiga, citra frasa kekerasan seksual. Penggunaan frasa kekerasan seksual dianggap tidak tepat dan multitafsir. Bahkan, beberapa kali dijelaskan dalam pemberitaan Voa-islam.com untuk mengganti frasa kekerasan seksual dengan kejahatan seksual. Menggunakan istilah kejahatan seksual akan lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Hal ini seperti kutipan teks berikut:

“Soalnya menurut kami frasa kekerasan seksual yang termaktub dalam RUU P-KS ini multitafsir sehingga penerapannya akan berbenturan dengan subjektifitas pelaku dan korban dan beberapa pasal didalamnya”. Selain itu, beberapa pasal yang diatur dalam RUU PKS juga dinilai berpotensi melegalkan LGBT dengan adanya pelanggaran atas hak tubuh seseorang. Seperti pada pasal 7 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang hak atas diri, tubuh dan seksualitas.

Dalam teks berita Voa-islam.com pertimbangan penting untuk menolak RUU PKS didasarkan pada roots: RUU P-KS melegalkan zina, LGBT dan seks bebas. Dengan mengangkat isu LGBT tentu akan menjadikan citra negatif terhadap RUU P-KS. Terutama dalam pandangan masyarakat Indonesia isu LGBT cukup sensitif, terutama jika terkait pelegalan atau perizinannya.

Bahkan, RUU P-KS dalam lingkup yang lebih besar dinilai dapat merusak masa depan bangsa. Dengan diberikannya hak kontrol atas tubuh setiap individu, maka perempuan khususnya akan diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu. Sehingga, pihak orang tua pun dilarang untuk memaksakan anaknya untuk menutup aurat.

Sedangkah dalam pandangan Nu.Or.id RUU P-KS bukan lah undang-undang yang melegalkan zina, LGBT atau pun seks bebas. Karena, undang-undang ini justru dibuat untuk melindungi hak korban kekerasan. Selain itu, yang menyusun RUU P-KS adalah dari orang-orang islam dan bersumber dari ajaran islam. Jadi tidak mungkin RUU P-KS dibuat untuk tujuan pelegalan zina. Selain itu, hasil Munas-Konbes NU yang digelar pada 27 februari-1 maret 2019 menyatakan mendukung disahkannya RUU P-KS. Hal ini seperti kutipan teks berikut:

“Jika membaca tuntas RUU PKS tersebut, tentu mereka tidak akan berkesimpulan begitu. sebab, di antara sumber penyusunannya adalah ajaran agama islam dan yang menyusun juga orang-orang yang beragama islam”

Adanya pelebelan bahwa RUU P-KS merupakan RUU yang pro-zina merupakan hoaks (berita bohong). Hoaks tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan golongan tertentu. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai hoaks tersebut. Tujuan dari RUU P-KS adalah membantu perempuan yang menjadi kaum paling rentan terhadap kekerasan seksual untuk terpenuhi hak-hak nya sebagai korban. Hal ini seperti kutipan teks berikut:

“Empat tujuan RUU ini sangat mulia dan hampir tak bisa ditolak oleh siapa pun, yakni: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual”.

Terdapat tiga citra yang ditampilkan Nu.or.id dalam pemberitaan RUU P-KS. Pertama, citra pentingnya RUU P-KS untuk disahkan. Dengan menggunakan beberapa frasa seperti “kemaslahatn umat” dan “melindungi korban” Nu.or.id ingin menunjukkan sisi positif RUU P-KS. Karena, selama ini korban kekerasan seksual belum terpenuhi hak-hak nya sebagai korban. Misalnya tentang jaminan rehabilitasi, kompensasi dan mengupayakan sanksi berat bagi pelaku kekerasan. Hal ini seperti kutipan teks berikut :

“Semangat RUU ini selain membuat jera pelaku, juga untuk melindungi dan memulihkan korban secara manusiawi”

Kedua, citra baik DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengesahkan undang-undang dinilai mampu memberikan keputusan yang terbaik bagi nasib RUU P-KS. Karena pemerintah dan DPR bukan lah pihak yang mendukung LGBT atau aktivitas seks bebas yang lain. Sehingga, adanya pihak yang menyatakan RUU P-KS pro LGBT dan zina adalah pihak yang sedang menghambat kinerja pemerintah. Hal ini misalnya dalam kutipan teks berikut:

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebuah materi yang pengesahaannya juga bergantung pada hasil kajian para anggota legislatif yang sedang duduk di parlemen. Alangkah kejinya tuduhan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab tersebut kepada pemerintah yang sedang menjalankan tugasnya”

Ketiga, citra RUU P-KS bukan Undang-undang yang pro zina atau LGBT. Dengan memberikan beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang terhambat hukum seperti kasus ibu Baiq Nuril yang gagal memperjuangkan hak nya sebagai korban, menjadi catatan untuk segera disahkannya RUU P-KS. Undang-undang ini akan mampu

memberikan hak-hak korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan. Selain itu, adanya indikasi banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan menjadi bukti besarnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dimana Fenomena seperti ini menyerupai fenomena gunung es. Hal ini misalnya dalam kutipan teks berikut:

“Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sudah seperti fenomena gunung es. Di mana kasus yang diketahui hanya sebagian kecil saja. Bahkan ada indikasi bahwa kasus yang terjadi namun tidak dilaporkan jauh lebih besar angkanya dibandingkan yang dilaporkan”

Selain beberapa citra tersebut juga terdapat beberapa pembenar-pembenar yang digunakan oleh Nu.or.id untuk mendukung gagasan utama yang ingin ditonjolkan dalam pemberitaan. Nu.or.id beberapa kali menekankan bahwa RUU P-KS bukan pro zina dan pro LGBT. Roots yang digunakan adalah RUU P-KS bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, kemuliaan perempuan dan melindungi korban kekerasan.

Tidak hanya itu, terdapat pula beberapa klaim moral (appeals to principle) Nu.or.id dalam pemberitaan RUU P-KS. Misalnya tentang lima pertimbangan dasar pengesahan RUU P-KS yang didasarkan pada semangat Al-syatibi untuk mengusung konsep 'Al-Maslahat' dalam hukum Islam. Kelima pertimbangan tersebut meliputi: darul mafasid, jalbul maslahah, nahyul munkar, hifdhul 'irdl dan hifdhun nasl.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari hasil analisis framing model William A. Gamson dan Modigliani atas pemberitaan RUU P-KS, penulisan berita pada Voa-islam.com lebih banyak menyoroti citra negatif RUU P-KS yang berujung pada tolak RUU P-KS. Sedangkan pada Nu.or.id lebih banyak memunculkan citra positif RUU P-KS yang berujung pada deklarasi dukung RUU P-KS. Citra negatif yang dimunculkan oleh Voa-islam.com dengan adanya pelabelan (depiction) RUU P-KS pro zina dan LGBT. Sedangkan pelabelan (depiction) yang digunakan oleh Nu.or.id adalah RUU P-KS untuk kemaslahatan umat dan perlindungan hak korban. Tidak hanya itu, penggunaan metafor seperti “racun berbalut madu” atau “mematikan api dengan menyiram bensin” digunakan oleh Voa-islam.com untuk menambah citra negatif RUU P-KS. Sedangkan yang dilakukan oleh Nu.or.id untuk menambah citra positif RUU P-KS adalah dengan memberikan beberapa klaim moral (Appeals to principle) bahwa RUU P-KS disusun atas dasar pertimbangan masalah suatu hukum Islam untuk terwujudnya keadilan hukum bagi perempuan dan korban kekerasan seksual pada umumnya.

Masing-masing media juga menunjukkan citra tertentu. Terdapat tiga citra yang dikonstruksi Voa-islam.com atas RUU P-KS, yakni citra yang baik terhadap partai PKS dan Gerindra, citra yang baik terhadap sistem Islam dan citra frasa kekerasan seksual. Sedangkan Nu.or.id juga membangun tiga citra atas framing RUU P-KS, yakni citra pentingnya RUU P-KS untuk disahkan, citra baik DPR dan pemerintah serta citra RUU P-KS bukan Undang-undang yang pro zina atau LGBT.

Daftar Pustaka

- Eriyanto, 2009, *Analisis Framing*, Yogyakarta: Lkis.
- Febriani, Sasyabella., 2011, “*Konstruksi Media terhadap The Jakmania oleh Media Cetak Kompas selama Putaran I dan II Liga Super Indonesia 2009/2010*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 11 (2011).
- Mizwar, Nanang Hasyim., 2016, *Konstruksi Citra Maskulin Calon Presiden*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol. 10 No. 01 (2016).
- Sumarjo, 2010, *Pertarungan Wacana Media*, Jurnal Inovasi Vol. 7 No. 2 (2010).
- Syarifudin, dkk., 2016, “*Representasi Ideologi Media Dibalik Wacana Calon Gubernur*”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 20, No. 01, (2016).
- Tabroni, Roni., 2017, *Media Massa Islam*. Yogyakarta: Calpulis.
- <https://www.voa-islam.com/>.
- <http://www.nu.or.id/>.
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19203>.